BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BISMILLAHHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengamanahkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan,melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani,meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c.bahwa . . .

c. bahwa Kabupaten Pidie Jaya sebagai daerah agraris telah memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan pangan nasional, sekaligus menjadi mata pencarian pokok dan sumber penyediaan lapangan kerja, juga dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan, maka untuk mengendalikan dan pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan adanya pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu dan terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3656);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7.Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

15.Undang . .

15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5433);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penata Gunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5288);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

26. Peraturan . . .

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan;
29. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
30. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3.Pemerintah . . .

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelengaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
11. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
12. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
14. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

15.Kawasan . . .

15. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
17. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
18. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
20. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
21. Petani Pangan, yang selanjutnya disebutPetani adalah setiapwarga Negara Indonesiabeserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
22. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
23. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembanganproduksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yangtepat.

24.Ekstensifikasi . .

24. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
25. DiversifikasiPertanianadalahusaha penganekaragaman usaha tani (*diversifikasi horizontal*) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (*diversifikasivertikal).*
26. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan Pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
27. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis dan irigasi perdesaan.
28. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi kelestarian fungsilahan.
29. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan Beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
30. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

## BAB II

## ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. keislaman;
b. manfaat;
c. keberlanjutan dan konsisten;
d. produktif;
e. keterpaduan;
f. keterbukaan dan akuntabilitas;

g.kebersamaan . . .

g. kebersamaan dan gotong-royong;
h. partisipatif;
i. keadilan;
j. kebenaran;
k. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
l. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
m. desentralisasi;
n. tanggung jawab negara;
o. keragaman; dan
p. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegritasi, meliputi:

a. perencanaan dan penetapan;
b. penelitian;
c. pengembangan;
d. pemanfaatan;
e. pembinaan;
f. pengendalian;
g. pengawasan;
h. sistem informasi;
i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
j. pembiayaan; dan
k. peran serta masyarakat.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

a. lahan beririgasi;

b. lahan tidak beririgasi;dan

c. lahan reklamasi rawa non pasang surut.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangandan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Pasal 7

(1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan didalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 8

Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:

a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;dan

c.lahan . . .

c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Rencana kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan rencana Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b direncanakan pada semua kecamatan dalam kabupaten.

(4) Rencana Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan pada lahan potensial pada semua kecamatan dalam kabupaten.

(5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dasarkan pada :

a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
b. pertumbuhan produktivitas;
c. kebutuhan pangan;
d. kebutuhandan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
e. pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi;
f. musyawarah petani;dan
g. rencana tata ruang dan tatawilayah kabupaten.

(6) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.

(7) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaskud pada ayat (6) didasarkan atas kriteria :

a. Kesesuaian lahan;
b. Ketersediaan infrastruktur;
c. Penggunaan lahan;
d. potensi teknis lahan;dan/atau
e. luasan kesatuan hamparanlahan.

Pasal 10

(1) Luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan,luas lahan yang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.

(2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu ditingkat kabupaten.

(3) Perencanaan ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di tingkat kabupaten.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun di tingkat kabupaten.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. perencanaan jangka panjang;
   b. perencanaan jangka menengah; dan
   c. perencanaan tahunan.

Paragraf 1

Perencanaan Jangka Panjang

Pasal 12

(1) Perencanaan Jangka Panjang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan 20 (dua puluh) tahunan yang memprediksikan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan semakin berkurang karena akan beralih fungsi seiring dengan bertambah penduduk dan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan kabupaten.

(2) Alih fungsi lahan pertanian pangan dikawasan ibukota kabupaten yang terdiri dari Kecamatan Meureudu, Kecamatan Meurah Dua dan Kecamatan Ulim lebih tinggi dari kawasan Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Panteraja, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Bandar Dua dan kecamatan Jangka Buya.

(3) Sasaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sasaran lahan pertanian pangan cadangan tersebar di 8 (delapan) kecamatan dalam kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam qanun ini.

Paragraf 2

Perencanaan Jangka Menengah

Pasal 13

Perencanaan Jangka Menengah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan yang memprediksikan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan akan berkurang karena akan beralih fungsi seiring dengan pengembangan kawasan permukiman dan kawasan ibukota, sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini.

Paragraf 3

Perencanaan Tahunan

Pasal 14

Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan diatur dengan keputusan Kepala Dinassesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah kabupaten.

(2) Usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:

a. inventarisasi;

b. identifikasi; dan

c. penelitian.

Pasal 16

(1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.

(2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah gampong, kecamatan dan kabupaten.

Pasal 17

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 18

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK), dan Rencana Tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Pasal 19

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan didalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;dan
c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan diluar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 20

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
(3) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan terletak pada semua kecamatan dalam Kabupaten .
(4) Detail kawasan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 21

(1) Selain kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)Kabupaten Pidie Jaya juga ditetapkan kawasan khusus yang harus dilindungi sebagai kawasan strategis nasional.
(2) Perlindungan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. luas kawasan pertanian pangan;
    b. produktivitas kawasan pertanian pangan;

c. potensi teknis lahan;
d. keandalan infrastruktur; dan
e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Pasal 22

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsidiatur dalam Qanun Aceh mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi.
(3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten diatur dalam Qanun Kabupaten mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten.
(4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
(3) Lahan Pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas 8.818 Ha (delapan ribu delapan ratus delapan belas) hektar.
(4) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di wilayah:
   a. Kecamatan Bandar Baru dengan luas 1.872 Ha;
   b. Kecamatan Panteraja dengan luas 229 Ha;
   c. Kecamatan Trienggadeng denganluas 1.384 Ha;
   d. Kecamatan Meureudu dengan luas 1.265Ha;
   e. Kecamatan Meurah Dua dengan luas 595 Ha;
   f. Kecamatan Ulim dengan luas 785 Ha;
   g. Kecamatan Jangka Buya dengan luas 501Ha;
   h. Kecamatan Bandar Dua dengan luas 2.187 Ha;
(5) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Penetapan lahan cadangan pangan pertanian berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, meliputi:
   a. Memiliki potensi teknis, kesesuaian lahan, sangat sesuai, sesuai, sesuai marginal dengan peruntukan pertanian pangan;
   b. ketersediaan insfrastruktur dasar;dan
   c. luas kesatuan hamparan dalam satu bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Potensi teknis untuk lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
   a. lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memiliki potensi teknis lahan yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan;
   b. terdapat sumber air baik berupa air permukaan maupun air tanah yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman;
   c. terdapat lahan potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi dan non-irigasi;dan
   d. petani bersedia untuk mengembangan tanaman pangan di lokasi tersebut.

(3) Ketersediaan infrastruktur dasar sebagai lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pembangunan infrastruktur dasar padaLahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air dalam RTRW kabupaten.

(4) Luas kesatuan hamparan dalam satu bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
   a. paling sedikit seluas 5(lima) hektar persatuan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;dan
   b. paling sedikit memiliki luas 500 (lima ratus) hektar dalam satu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

(1) Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
   a. tidak berada pada kawasan hutan lindung;dan
   b. tidak dalam sengketa.

(2) Persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :
   a. tidak dalam sengketa;
   b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
   c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, maka persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut :
   a. Tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dialokasikan dan/atau dilepas untuk kawasan peruntukan pertanian.
   b. Tidak dalam sengketa lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan hutan yang dapat dikonversi dan/atau lahan terlantar yang dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   c. Status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah lahan tersebut telah dilekati hak atas tanah berupa tanah negara, diberikan hak atas dan/atau tanah ulayat; dan
   d. ketentuan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan kawasan dan lahan yang termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(4) Mekanisme penyelesaian sengketa lahan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENELITIAN

Pasal 27

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Pemerintah kabupaten.

(3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengembangan penganekaragaman pangan;
b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
c. pemetaan zonasi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. Inovasi pertanian;
e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
f. fungsi ekosistem;dan
g. sosial budaya dan kearifanlokal.

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau PerguruanTinggi.

Pasal 28

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 29

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya di Pidie Jaya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 30

(1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah kabupaten, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
(3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
(4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah kabupaten melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 31

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan:

a. peningkatan kesuburan tanah;
b. peningkatan kualitas benih/bibit;
c. pendiversifikasian tanaman pangan;
d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
e. pengembangan irigasi;
f. pemanfaatan teknologi pertanian;
g. pengembangan inovasi pertanian;
h. penyuluhan pertanian; dan/atau
i. jaminan akses permodalan.

Pasal 32

(1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan:
    a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
    c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
(3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat izindari pemerintah kabupaten dengan batas minimal 3 (tiga) Hektar.
(5) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan kepada pamerintah kabupaten.

(6)Mekanisme . . .

(6) Mekanisme perizinan sebagimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

(7) TanahTelantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:

a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau

b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

(8) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:

a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindak lanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau

b. tanah tersebut selama1(satu)tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.

(9) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.

Pasal 33

Penetapan dan alih fungsilahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian berkelanjutan memiliki kriteria sebagai berikut :

a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktifitas dan efesiensi produksi;

b. memilik potensi sesuai, sangat sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;dan

c. didukung infrastruktur dasar;

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 34

(1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.

(2) Pemerintah kabupaten bertanggungjawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:

a.perlindungan . . .

a. perlindungan sumber daya lahan dan air;

b. pelestarian sumber daya lahan dan air;

c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan

d. pengendalian pencemaran.

(3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:

a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan

b. mencegah kerusakan irigasi.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:

a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;

b. mencegah kerusakan lahan; dan

c. memelihara kelestarian lingkungan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 36

(1) Pemerintah dan pemerintah kabupaten wajib melakukan:

a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. koordinasi perlindungan;

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;

e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;dan/atau

f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan kepada aspek pelaporan yang disampaikan oleh para pelaku usaha tani berdasarkan laporan tersebut dilakukan bimbingan dan rekomendasi terhadap permasalahan dan solusi yang diberikan kepada pemerintah kabupaten, para pelaku usaha tani dan termasuk petaninya.

## BAB VIII
## PENGEDALIAN
### Bagian Kesatu
### Umum
### Pasal 37

(1) PengendalianLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.

(2) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui pemberian:

a. insentif;

b. disinsentif;

c. mekanisme perizinan;

d. proteksi; dan

e. penyuluhan.

### Bagian Kedua
### Insentif dan Disinsentif
### Pasal 38

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diberikan kepada petani berupa:

a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;

b. pengembangan infrastruktur pertanian;

c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;

d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;

f.jaminan . . .

f. jaminan penerbitan sertipikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau

g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

(2) Insentif sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 39

(1) Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatensesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah provinsidapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 38 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:

a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. kesuburan tanah;
c. luas tanam;
d. irigasi;
e. tingkat fragmentasi lahan;
f. produktivitas usaha tani;
g. lokasi;
h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 41

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten dapat memberikan insentiflainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 42

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Alih Fungsi

Pasal 43

(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan.

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialih fungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
   a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
   b. disusun rencana alih fungsi lahan;
   c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
   d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap LahanPertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

(6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), pihak yang mengalih fungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Pasal 45

(1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat(3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;

b.paling . . .

b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan

c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

(2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagaipengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) maupun Rencana Program Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

(3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagaiLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau

c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan penggantiakan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah kabupaten melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dal am suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 46

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 44 dan Pasal 45 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Pasal 48

(1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
(2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
(3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 49

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangikesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 50

(1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Pidie Jaya dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
    a. perencanaan dan penetapan;
    b. pengembangan;
    c. pemanfaatan;
    d. pembinaan; dan
    e. pengendalian.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten.

Pasal 51 . . .

Pasal 51

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

a.pelaporan;

b.pemantauan; dan

c.evaluasi.

Pasal 52

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan oleh pemerintahan gampong kepada pemerintah kabupaten.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya oleh pemerintah kabupaten dalam laporan tahunan.

Pasal 53

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X . . .

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 54

(1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

(3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
   a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   c. Lahan CadanganPertanian Pangan Berkelanjutan;dan
   d. Tanah Telantar dansubyek haknya.

(4) Data Lahan dalam system informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
   a. fisik alamiah;
   b. fisik buatan;
   c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
   d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
   e. luas dan lokasi lahan; dan
   f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

(5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten pidie jaya dalam hal informasi Lahan Pertanian kabupaten oleh bupati.

Pasal 55

(1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 53 dilakukan sampai kecamatan dan gampong.

(2) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan dikelola oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antar lembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga Pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

BAB XI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 56

Pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 57

(1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berupa pemberian jaminan:
   a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
   b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
   c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
   d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
   e. ganti rugi akibat gagal panen.
(2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:
a. penguatan kelembagaan petani;
b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; dan
e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 59

(1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.
(2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

BAB XIII . . .

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :

a. Perencanaan;
b. Pengembangan;
c. Penelitian;
d. Pengawasan;
e. Pemberdayaan petani;dan/atau
f. Pembiayaan

Pasal 61

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilakukan melalui:

a. Pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupatan Pidie Jaya dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
b. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
c. Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
d. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
e. Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
f. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
g. Pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
h. Pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 62 . . .

Pasal 62

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

a. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
b. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 63

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggung jawabannya di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum AcaraPidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencaridan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau korporasi sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup;
    d. memberikan buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan lahan pertanian dan/ataupengelolaan lingkungan hidup;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atausaksi;
j. menghentikan penyidikan;dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidika tindak pidana dibidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 64

Setiap kegiatan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:

a. Teguran tertulis;
b. Paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin;dan
d. pencabutan izin.

Pasal 65

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak membebaskan pelanggar dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

Pasal 66

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.

(2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 64 huruf b berupa:
   a. penghentian sementara kegiatan;
   b. pemindahan sarana kegiatan;
   c. pembongkaran;
   d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
   e. penghentian sementara seluruh kegiatan;dan
   f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

(3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
   a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
   b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya;dan/atau
   c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 67

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi jaringan irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Dalam . . .

(4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Qanun ini, maka diberlakukan ancaman Pidana yang lebih tinggi.

(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan dari qanun ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak qanun ini diundangkan.

Pasal 69

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 24 Maret 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal 24 Maret 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH: (1/50/2021).

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasandan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Bahwa alihfungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, yang menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan, dimana kondisi ini berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat petani. Maka dibutuhkan langkah pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan, dengan mengatur dalam Qanun Kabupaten tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Pidie Jaya serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian kenonpertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR . . .

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 Maret 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

**LAHAN BAKU SAWAH KABUPATEN PIDIE JAYA**

| KECAMATAN | GAMPONG | ID GAMPONG | LUAS LAHAN BAKU SAWAH (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MEUREUDU | MNS MULIENG | 1118010001 | 79 |
| | LAMPOIH LADA | 1118010002 | 124 |
| | GLUMPANG TUTONG | 1118010003 | 38 |
| | RUNGKOM | 1118010004 | 38 |
| | BLANG AWE | 1118010005 | 77 |
| | MANYANG LANCOK | 1118010006 | 98 |
| | POHROH | 1118010007 | 52 |
| | KUDRANG | 1118010008 | 49 |
| | MEUNASAH HAGU | 1118010009 | 8 |
| | DAYAH TUHA | 1118010010 | 52 |
| | RUMPUEN | 1118010011 | 65 |
| | MEUNASAH KULAM | 1118010012 | 44 |
| | RAMBONG | 1118010013 | 47 |
| | GRONG GRONG | 1118010014 | 50 |
| | KUTA TRIENG | 1118010015 | 38 |
| | PULO U | 1118010016 | 26 |
| | MANYANG CUT | 1118010017 | 45 |
| | BEURAWANG | 1118010018 | 35 |
| | DAYAH TIMU | 1118010019 | 28 |
| | BUNOT | 1118010020 | 41 |
| | TEUPIN PEURAHO | 1118010021 | 50 |
| | GEULEUDAH | 1118010022 | 17 |
| | MEUNASAH LHOK | 1118010023 | 25 |
| | MESJID TUHA | 1118010024 | 28 |
| | RHIENG MANCANG | 1118010025 | 22 |
| | RHIENG KRUENG | 1118010026 | 25 |
| | RHIENG BLANG | 1118010027 | 25 |
| | MEURAKSA | 1118010028 | 26 |
| | MEUNASAH BALEK | 1118010029 | 14 |
| | KOTA MEUREUDU | 1118010030 | - |
| | | | **1.265** |
| MEURAH DUA | SEUNONG | 1118020001 | 60 |
| | LHOK SANDENG | 1118020002 | 61 |
| | SARAH MANE | 1118020003 | 15 |
| | LANCOK | 1118020004 | 46 |
| | MEUNASAH KULAM | 1118020005 | 27 |
| | MEUNASAH TEUNGOH | 1118020006 | 28 |
| | GEUNTENG | 1118020007 | 53 |
| | MEUNASAH BIE | 1118020008 | 34 |
| | MEUNASAH RAYA | 1118020009 | 43 |
| | GAMPONG BLANG | 1118020010 | 16 |
| | BLANG CUT | 1118020011 | 20 |
| | MEUNASAH MANCANG | 1118020012 | 36 |
| | PANTE BEUREUNE | 1118020013 | 5 |
| | DAYAH KRUET | 1118020014 | 33 |
| | BEURINGEN | 1118020015 | 34 |
| | DAyAH USEN | 1118020016 | 20 |

| KECAMATAN | GAMPONG | ID GAMPONG | LUAS LAHAN BAKU SAWAH (Ha) |
|---|---|---|---|
| | MEUNASAH JURONG | 1118020017 | 11 |
| | BUANGAN | 1118020018 | 20 |
| | LUENG BIMBA | 1118020019 | 33 |
| | | | **595** |
| BANDAR DUA | GAHRU | 1118030001 | 71 |
| | KUMBA | 1118030002 | 103 |
| | BLANG MIROE | 1118030003 | 68 |
| | BEURASAN | 1118030004 | 11 |
| | COT KENG | 1118030005 | 36 |
| | KRUENG KIRAN | 1118030006 | 49 |
| | ASAN KUMBANG | 1118030007 | 20 |
| | PULO GAPU | 1118030008 | 45 |
| | COT GURUFAI | 1118030009 | 29 |
| | ALUE SANE | 1118030010 | 106 |
| | LHOK PUSONG | 1118030011 | 46 |
| | ALUE KEUTAPANG | 1118030012 | 65 |
| | JEULANGA BARAT | 1118030013 | 77 |
| | JEULANGA MATA IE | 1118030014 | 10 |
| | JEULANGA MESJID | 1118030015 | 38 |
| | MEUNASAH PAKU | 1118030016 | 18 |
| | MEURANDEH ALUE | 1118030017 | 87 |
| | REUDEUP MELAYU | 1118030018 | 20 |
| | PAYA PISANG KLAT | 1118030019 | 141 |
| | ALUE MEE | 1118030020 | 45 |
| | DRIEN TUJOH | 1118030021 | 102 |
| | BLANG KUTA | 1118030022 | 146 |
| | SEUNONG | 1118030023 | 29 |
| | POHROH | 1118030024 | 38 |
| | BABAH KRUENG | 1118030025 | 68 |
| | UTEUN BAYU | 1118030026 | 54 |
| | MUKO BULOH | 1118030027 | 30 |
| | DRIEN BUNGONG | 1118030028 | 80 |
| | MEUGIT SAGOE | 1118030029 | 25 |
| | MEUGIT KAYEE PANYANG | 1118030030 | 32 |
| | ADAN | 1118030031 | 56 |
| | MUKO DAYAH | 1118030032 | 60 |
| | Keudee Ulee Gle | | - |
| | PULO | 1118030034 | 30 |
| | KAMPONG BARO | | 1 |
| | GAMPONG ULEE GLE | 1118030036 | 42 |
| | MUKO KUTHANG | 1118030037 | 36 |
| | PEULAKAN TUNONG | 1118030038 | 34 |
| | PEULAKAN TAMBO | 1118030039 | 29 |
| | KUTA KRUENG | 1118030040 | 43 |
| | PAYA TUNONG | 1118030041 | 22 |
| | PAYA BAROH | 1118030042 | 26 |
| | BLANG DALAM | 1118030043 | 40 |
| | MUKOE BAROH | 1118030044 | 43 |
| | PEULAKAN CIBREK | 1118030045 | 38 |
| | | | **2.187** |
| JANGKA BUYA | MEUKO JURONG | 1118040001 | 8 |
| | BUKET TEUNGOH | 1118040002 | 52 |
| | JURONG ARA | 1118040003 | 49 |
| | JURONG TEUNGOH | 1118040004 | 44 |
| | JURONG BINJE | 1118040005 | 32 |
| | REULUI MANGAT | 1118040006 | 53 |

| KECAMATAN | GAMPONG | ID GAMPONG | LUAS LAHAN BAKU SAWAH (Ha) |
|---|---|---|---|
| | MEUNASAH MEE | 1118040007 | 33 |
| | MEUNASAH KUMBANG | 1118040008 | 22 |
| | KUTA BAROH | 1118040009 | 27 |
| | MEUKO MEUGIT | 1118040010 | 18 |
| | KEURISI MEUNASAH RAYA | 1118040011 | 14 |
| | KIRAN DAYAH | 1118040012 | 39 |
| | KIRAN BAROH | 1118040013 | 26 |
| | KIRAN KRUENG | 1118040014 | 38 |
| | KEURISI MEUNASAH LUENG | 1118040015 | 10 |
| | KEUDE JANGKA BUYA | 1118040016 | 5 |
| | GAMPONG COT | 1118040017 | 18 |
| | KEURISI MEUNASAH BEUREMBANG | 1118040018 | 13 |
| | | | **501** |
| ULIM | AUE KEUMIKI | 1118050001 | |
| | LHOK GAJAH | 1118050002 | |
| | BLANG RHEUE | 1118050003 | 10 |
| | COT SEUTUI | 1118050004 | 8 |
| | MEUNASAH MESJID | 1118050005 | 5 |
| | BLANG CARI | 1118050006 | 5 |
| | BIDOK | 1118050007 | 17 |
| | BALEE ULIM | 1118050008 | 71 |
| | PANTANG COT BALOI | 1118050009 | 41 |
| | NANGRHOE BARAT | 1118050010 | 59 |
| | REULEUT | 1118050011 | 35 |
| | SAMBONGAN BARO | 1118050012 | 36 |
| | DAYAH BAROH | 1118050013 | 44 |
| | MEUNASAH PUPU | 1118050014 | 25 |
| | NANGRHOE TIMU | 1118050015 | 35 |
| | MEUNASAH KUMBANG | 1118050016 | 20 |
| | MESJID ULIM TUNONG | 1118050017 | 7 |
| | SIBLAH COH | 1118050018 | 17 |
| | PULO ULIM | 1118050019 | 30 |
| | GRONG GRONG CAPA | 1118050020 | 5 |
| | TANJONG ULIM | 1118050021 | 18 |
| | MEUNASAH KRUENG | 1118050022 | 16 |
| | KEUDE ULIM | 1118050023 | 1 |
| | DAYAH LUBUE | 1118050024 | 38 |
| | MESJID ULIM BAROH | 1118050025 | 43 |
| | MEUNASAH BUENG | 1118050026 | 36 |
| | GEULANGGANG | 1118050027 | 55 |
| | TIJIEN HUSEN | 1118050028 | 25 |
| | PULO LHOK | 1118050029 | 50 |
| | TIJIEN DABOH | 1118050030 | 31 |
| | | | **785** |
| TRIENGGADENG | PANTON RAYA | 1118060001 | 50 |
| | PEULANDOK TUNONG | 1118060002 | 80 |
| | PEULANDOK TEUNGOH | 1118060003 | 71 |
| | BULOH | 1118060004 | 68 |
| | DAYAH UJONG BAROH | 1118060005 | 65 |
| | MATANG | 1118060006 | 43 |
| | DEE | 1118060007 | 18 |
| | DEAH TEUMANAH | 1118060008 | 128 |
| | TAMPUI | 1118060009 | 90 |
| | REUSEB | 1118060010 | 70 |
| | MESJID PEUDEUEK BAROH | 1118060011 | 62 |
| | TUHA | 1118060012 | 77 |

| KECAMATAN | GAMPONG | ID GAMPONG | LUAS LAHAN BAKU SAWAH (Ha) |
|---|---|---|---|
| | PAYA | 1118060013 | 44 |
| | MESJID TRIENGGADENG | 1118060014 | 25 |
| | TUENG KLUET | 1118060015 | 30 |
| | MEE PANGWA | 1118060016 | 30 |
| | RAWASARI | 1118060017 | 38 |
| | COT MAKASO | 1118060018 | 18 |
| | KUTA | 1118060019 | 62 |
| | MEUCAT | 1118060020 | 40 |
| | DEAH PANGWA | 1118060021 | 45 |
| | COT LHEUE RHEUNG | 1118060022 | 10 |
| | MEUE | 1118060023 | 59 |
| | KEUDE | 1118060024 | - |
| | RAYA | 1118060025 | 35 |
| | MEE PEUDUEK | 1118060026 | 80 |
| | SAGOE | 1118060027 | 48 |
| | | | **1.384** |
| PANTERAJA | LHOK PU'UK | 1118070001 | 17 |
| | TUNONG | 1118070002 | 35 |
| | TEUNGOH | 1118070003 | 59 |
| | PEURADE | 1118070004 | 52 |
| | REUDEUP | 1118070005 | 34 |
| | MESJID | 1118070006 | 25 |
| | MUKA BLANG | 1118070007 | 8 |
| | TU PANTEE RAJA | 1118070009 | 0 |
| | | | **229** |
| BANDAR BARU | MNS AKI NEUNGOH | 1118080001 | 29 |
| | MNS ABAH LUENG | 1118080002 | 52 |
| | MEUNASAH JIJIEM | 1118080003 | 44 |
| | MNS SARAH PANYANG | 1118080004 | 54 |
| | MNS BLANG SUKON | 1118080005 | 113 |
| | MNS KAYEE JATOE | 1118080006 | 140 |
| | MNS BLANG BARO | 1118080007 | 56 |
| | MNS BLANG IBOIH | 1118080008 | 78 |
| | MNS DAYAH LANGIEN | 1118080009 | 37 |
| | MNS BLANG KRUENG | 1118080010 | 35 |
| | MEUNASAH ALUE | 1118080011 | 39 |
| | MNS TANOH MIRAH | 1118080012 | 48 |
| | MNS UJONG LEUBAT | 1118080013 | 52 |
| | MNS TUALADA | 1118080014 | 25 |
| | MNS CUT LANGIEN | 1118080015 | 49 |
| | MEUNASAH SAGOE | 1118080016 | 81 |
| | MNS BAROH COT | 1118080017 | 52 |
| | MEUNASAH BALEE | 1118080018 | 62 |
| | MNS TEUNGOH | 1118080019 | 67 |
| | MNS BAROH MUSA | 1118080020 | 62 |
| | MNS PARU KEUDE | 1118080021 | 1 |
| | MNS LANCANG | 1118080022 | - |
| | MNS UDEUNG | 1118080023 | 26 |
| | MEUNASAH ARA | 1118080024 | 38 |
| | MNS BLANG GLONG | 1118080025 | 51 |
| | MEUNASAH KEUDE | 1118080026 | 3 |
| | MNS PUEB LUENG NIBONG | 1118080027 | 46 |
| | MNS DABOIH | 1118080028 | 30 |
| | MNS PULO RHENG | 1118080029 | 23 |
| | MNS GAMPONG | 1118080030 | 27 |
| | MNS DAYAH NYONG | 1118080031 | 34 |

| KECAMATAN | GAMPONG | ID GAMPONG | LUAS LAHAN BAKU SAWAH (Ha) |
|---|---|---|---|
| | MNS BEURANDEH | 1118080032 | 30 |
| | MNS KAYEE RAYA | 1118080033 | 48 |
| | MEUNASAH SIREN | 1118080034 | 26 |
| | MEUNASAH TUTONG | 1118080035 | 30 |
| | MNS MANYANG | 1118080036 | 31 |
| | MNS BAROH LANCOK | 1118080037 | 60 |
| | MEUNASAH MESJID | 1118080038 | 47 |
| | MNS PULO PUEB | 1118080039 | 44 |
| | MEUNASAH SAWANG | 1118080040 | 17 |
| | MEUNASAH BARO | 1118080041 | 27 |
| | MNS CUT NYONG | 1118080042 | 43 |
| | MNS PARU COT | 1118080043 | 13 |
| | | | **1.872** |
| | | | **8.818** |

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 Maret 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

**PERENCANAAN JANGKA MENENGAH KONVERSI LAHAN PERTANIAN PANGAN**

| No | KECAMATAN | GAMPONG | LUAS AREAL (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Dua | Meurandeh Alue (Jalan Nasional) | 7,00 |
| | | Drien Bungong (Jalan Nasional) | 0,50 |
| | | Meugit Sagoe (Jalan Nasional) | 1,25 |
| | | Blang Dalam (Jalan Nasional) | 2,75 |
| | | Muko Kuthang (Perluasan Permukiman) | 4,00 |
| | | Paya Tunong (Perluasan Permukiman) | 2,50 |
| | | Meuko Baroh (Perluasan Permukiman) | 4,00 |
| | | Keude Ulee Gle ( Perluasan Permukiman) | 0,75 |
| | | Gampong Ulee Gle (Perluasan Permukiman) | 2,00 |
| | | | **24,75** |
| 2 | Jangka Buya | Keurisi Meunasah Raya (Perluasan Permukiman) | 1,00 |
| | | | **1,00** |
| 3 | Ulim | Balee Ulim (Jalan Nasional) | 7,25 |
| | | Dayah Leubue (Jalan Nasional) | 3,50 |
| | | Dayah Baroh (Jalan Nasional) | 4,25 |
| | | Pulo Lhok (Jalan Nasional) | 3,00 |
| | | Meunasah Krueng | 4,25 |
| | | | **22,25** |
| 4 | Meurah Dua | Meunasah Raya (Jalan Nasional) | 4,00 |
| | | | **4,00** |
| 5 | Meureudu | Beurawang (Pembangunan Mesjid Agung) | 6,00 |
| | | Dayah Timu ( Perluasan RSUD ) | 10,00 |
| | | Meunasah Lhok (Pembangunan Ruko) | 1,50 |
| | | Mesjid Tuha (Pembangunan Ruko) | 0,50 |
| | | Manyang Lancok (Perluasan Permukiman) | 2,00 |
| | | Bunot (Jalan Nasional) | 5,00 |
| | | Teupin Peuraho (Jalan Nasional) | 3,00 |
| | | Kuta Trieng (Jalan Nasional) | 0,75 |
| | | | **28,75** |
| 6 | Trienggadeng | Meucat (Jalan Nasional) | 1,00 |
| | | Kuta Pangwa (Jalan Nasional) | 5,00 |
| | | Meunasah Raya (Jalan Nasional) | 0,50 |
| | | Sagoe (Jalan Nasional) | 0,75 |
| | | | **1,50** |
| 7 | Panteraja | Reudeup (Jalan Nasional) | 1,50 |
| | | Peurade (Jalan Nasional) | 0,50 |
| | | | **2,00** |
| 8 | Bandar Baru | Teungoh Musa - Ara (Jalan Nasional) | 3,50 |
| | | Blang Glong (Jalan Nasional) | 1,50 |
| | | Keude Lueung Putu ( Pembangunan Ruko) | 3,00 |
| | | Dayah Langien (Perluasan Dayah Jeumala Amal dan Permukiman) | 4,00 |
| | | | **12,00** |
| **Total** | | | **96,25** |

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 Maret 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

PERENCANAAN JANGKA PANJANG KONVERSI LAHAN PERTANIAN PANGAN

| No | Kecamatan | Gampong | Luas Areal (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Dua | Kuta Krueng (Perluasan Dayah Darul Munawwarah) | 3 |
| | | Uteun Bayu (Perluasan Pemukiman) | 2 |
| | | Pulo (Perluasan Permukiman) | 1 |
| | | | **6** |
| | Jangka Buya | Jurong Ara (Perluasan Permukiman) | 0,75 |
| | | Jurong Teungoh (Perluasan Permukiman) | 1,95 |
| | | Jurong Binje (Perluasan Permukiman) | 1 |
| | | Keude Jangka Buya (Perluasan Permukiman) | 3,55 |
| | | Meunasah Mee (Perluasan Permukiman) | 0,25 |
| | | | **7,5** |
| 2 | Ulim | Dayah Leubue (Perluasan Pemukiman) | 3 |
| | | | **3** |
| 3 | Meurah Dua | Beuringen (perluasan Pemukiman) | 3 |
| | | Teupin Pukat (Perluasan Pemukiman) | 3 |
| | | | **6** |
| 4 | Meureudu | | |
| | | Meunasah Lhok (Perlusaan Permukiman) | 3 |
| | | Geuleudah (Perluasan Permukiman) | 3 |
| | | Dayah Timu ( Perluasan Permukiman) | 3 |
| | | Bunot (Perluasan Permukiman) | 5 |
| | | Rhieng Mancang (Perluasan Permukiman) | 4 |
| | | Rhieng Blang (Perluasan Permukiman) | 4 |
| | | Rungkom (Perluasan Permukiman) | 2 |
| | | Teupin Peuraho (Perluasan Permukiman) | 3 |
| | | | **27** |
| 5 | Trienggadeng | Meue (Perluasan Permukiman) | 3 |
| | | | **3** |
| **Total** | | | **52,5** |

1. BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN IV : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 Maret 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

**KONVERSI LAHAN SAWAH LINTASAN JALAN TOL**

| No | KECAMATAN | GAMPONG | LUAS AREAL (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Baru | Blang Sukon | 1,7 |
| | | Sarah Panyang | 2,5 |
| | | | **4,2** |
| 2 | Meureudu | Mulieng | 3,2 |
| | | Dayah Tuha | 2,4 |
| | | Kulam | 1,5 |
| | | Rambong | 2,4 |
| | | Grong Grong | 2,5 |
| | | Kuta Trieng | 2,5 |
| | | Teupin Peuraho | 2 |
| | | | **16,5** |
| 3 | Meurah Dua | Seunong | 2,1 |
| | | | **2,1** |
| 4 | Bandar Dua | Gahru | 8 |
| | | | **8** |
| **Total** | | | **30,80** |

1. BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 Maret 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

PERENCANAAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

| No | KECAMATAN | GAMPONG | LUAS AREAL (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Baru | Jiem-Jiem | 17,20 |
| | | Kayee Jatoe | 20,00 |
| | | Blang Sukon | 20,00 |
| | | Abah Lueng | 68,87 |
| | | Sarah Panyang | 5,00 |
| | | Aki Neungoh | 41,24 |
| | | | **172,31** |
| 2 | Panteraja | Muka Blang | 78,10 |
| | | Lhok Puuk | 7,50 |
| | | | **85,60** |
| 3 | Trienggadeng | Panton Raya | 3,10 |
| | | | **3,10** |
| 4 | Meureudu | Lampoh Lada | 90,50 |
| | | | **90,50** |
| 5 | Bandar Dua | Asan Kumbang | 8,60 |
| | | Gahru | 7,29 |
| | | Peulakan Tambo | 6,00 |
| | | | **21,89** |
| 6 | Jangka Buya | Mukoe Jurong | 11,00 |
| | | | **11,00** |
| **Total** | | | **384,40** |

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN VI : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 Maret 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

PERENCANAAN LAHAN KERING / TEGALAN UNTUK LAHAN PERTANIAN PANGAN

| No | KECAMATAN | GAMPONG | LUAS AREAL (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Baru | Aki Neungoh<br>Blang Krueng<br>Jiem-Jiem<br>Abah Lueng<br>Alue<br>Tua Lada<br>Sagoe Langien<br>Dayah Langien<br>Cut Langien<br>Blang Iboih<br>Teungoh Musa<br>Baroh Musa<br>Balee Musa<br>Keude Paru<br>Kayee Jatoe<br>Blang Sukon<br>Blang Baro<br>Sarah Panyang | 398,02 |
| 2 | Panteraja | Lhok Puuk<br>Muka Blang<br>Tunong<br>Mesjid Panteraja<br>Peurade<br>Reudeup<br>TU | 36,94 |
| 3 | Trienggadeng | Peulandok Tunong<br>Peulandok Teungoh<br>Peulandok Baroh<br>Deah Teumanah<br>Tampui<br>Reusep<br>Panton Raya | 944,46 |
| 4 | Meureudu | Mulieng<br>Lampoh Lada<br>Rungkom<br>Glumpang Tutong<br>Rumpuen<br>Meunasah Kulam | 843,5 |
| | | Rambong<br>Pohroh<br>Blang Awe | |
| 5 | Meurah Dua | Seunong<br>Lhok Sandeng<br>Sarah Manee<br>Lancok<br>Meunasah Kulam | 116,43 |

| No | KECAMATAN | GAMPONG | LUAS AREAL (Ha) |
|---|---|---|---|
| 6 | Ulim | Balee Ulim<br>Reuleut<br>Bidok<br>Pantang Cot Baloi<br>Meunasah Mesjid<br>Blang Rheu<br>Cot Seutui<br>Lhok Gajah<br>Alue Keumiki<br>Blang Cari | 217,05 |
| 7 | Jangka Buya | Buket Teungoh<br>Reului Mangat<br>Keurisi Meunasah Raya | 1,76 |
| 8 | Bandar Dua | Jeulanga Barat<br>Kumba<br>Gampong Baro<br>Drien Tujoh<br>Alue Sane<br>Gaharu<br>Lhok Pusong<br>Paya Pisang Klat<br>Cot Geureufai<br>Asan Kumbang<br>Cot Keng<br>Blang Miroe<br>Pulo Gapu<br>Krueng Kiran<br>Meurandeh Alue | 178,73 |
| **Total** | | | **2.736,89** |

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS